



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL GAFFAR
2. Jabatan : KETUA DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
3. NHK : 814387

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.671.505.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 389 m2/150 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.727.500.000
2. Tanah Seluas 365 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 469.505.000
3. Tanah Seluas 639 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 304.500.000
4. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **154.750.000**

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 135.750.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **136.235.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **172.133.153**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **4.134.623.153**



III. HUTANG

Rp. 104.258.038

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.030.365.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.